PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS/2023/PN. SMG)

¹Muhammad Zusron Hanafi*, ²Ira Alia Maerani

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
hanafizusron@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan studi kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN. Smg. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius, sehingga memerlukan penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga memberikan perlindungan bagi korban.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku dan hambatan penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang memadukan kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan analisis terhadap putusan pengadilan terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini efektif secara yuridis karena hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta denda Rp1.000.000.000,00 sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis, dengan fokus pada perlindungan korban sebagai anak di bawah umur dan pemberian efek jera kepada pelaku. Kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak yaitu terjadinya banyak korban yang tidak bersedia menjadi saksi untuk diminta keterangan dalam proses penyidikan sehingga memakan waktu yang lama. Namun, dari sisi preventif, penegakan hukum masih perlu ditingkatkan melalui edukasi publik, pengawasan lingkungan, dan program rehabilitasi korban.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

This study examines the law enforcement of sexual violence against children, using a case study of Decision Number 11/Pid.Sus/2023/PN. Smg. The background to this study is the high number of cases of sexual violence against children in Indonesia, which has serious psychological and social impacts, necessitating law enforcement that is not only repressive but also provides protection for victims.

The purpose of this study is to determine the extent of law enforcement in cases of sexual violence against children, analyze the judge's considerations in sentencing perpetrators, and identify obstacles to law enforcement regarding sexual crimes against children. This study uses a normative juridical method with a descriptive analytical approach, combining the study of legislation, legal doctrine, and analysis of relevant court decisions. The data used are secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively.

The research results indicate that law enforcement in this case was legally effective because the judge sentenced the defendant to 11 (eleven) years' imprisonment, minus the time served by the defendant for arrest and detention, and a fine of Rp1,000,000,000.00, in accordance with Article 82 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The judge's considerations encompassed legal, sociological, and psychological aspects, with a focus on protecting the victim as a minor and providing a deterrent effect to the perpetrator. Obstacles encountered in the process of enforcing the law on sexual crimes against children include the reluctance of many victims to testify during the investigation, resulting in lengthy proceedings. However, from a preventive perspective, law enforcement still needs to be improved through public education, environmental monitoring, and victim rehabilitation programs.

Keywords: *Law Enforcement, Sexual Violence, Children, Judge's Considerations, Child Protection.*

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Sebagai negara hukum, Indonesia mengharuskan penegakan hukum oleh setiap anggota masyarakat. Ini berarti bahwa setiap tindakan harus berlandaskan pada peraturan hukum yang berlaku. Hukum sendiri adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban. Setiap anggota masyarakat memiliki berbagai kepentingan, dan dalam memenuhi kepentingan tersebut, mereka menjalin hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada

tanggal 17 Oktober 2014. Penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di antaranya penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan disatukan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadinya perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan. (Saraswati, 2015)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah generasi penerus bangsa, dan mereka calon-calon pengganti pemimpin bangsa. Dengan cara memimpikan suatu masa depan yang menyenangkan, tentunya anak-anak sekarang juga mendapat kesenangan yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai anak-anak. Dengan diberikannya fasilitas pendidikan yang maksimal, tempat bermain untuk menumbuhkan komunikasi yang baik dan lain sebagainya yang layak untuk mereka dapatkan sebagai suatu perwujudan rasa tanggung jawab kita terhadap anak. Anak salah satu dari subjek hukum yang harus dilindungi, karena dalam melakukan perbuatan hukum sifatnya pasif karena harus diwakilkan oleh walinya, dalam mewujudkan perlindungan anak selain peran dari kedua orang tua, juga diperlukan peran dari pemerintah, salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang melindungi generasi penerus bangsa yaitu anak dengan mengeluarkan suatu produk hukum yang secara intensif dan lebih serius dalam melindungi hak-hak anak.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang lebih tua, yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sebenarnya beragam. Seperti meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual dengan anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, dan melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik di luar tindakan medis. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaku seksual adalah orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan Perempuan. (Nasional, 2012)

Dalam rangka penegakan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga sebagai tindak pidana, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Kusfitono, 2017) Tindakan tersebut meliputi proses penyelidikan oleh penyidik, yang kemudian diikuti dengan penyidikan. Penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang terjadi dapat terungkap dengan jelas serta untuk mengidentifikasi dan menetapkan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Upaya menemukan dan menetapkan pelaku sangat penting dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana atas peristiwa tersebut.

Sudah selayaknya anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penganiayaan, kekejaman dan penindasan dalam bentuk apapun anak tidak boleh menjadi bahan perdagangan. Karena pada hakikatnya anak merupakan generasi penerus bangsa, kenyataan anak yang terlantar atau dilantarkan, di eksploitasi atau dilecehkan. Jumlah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak, seperti fenomena gunung es, mungkin

jauh lebih tinggi dibandingkan yang dilaporkan ke penegak hukum. Banyak korban yang terlalu malu untuk melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Selain itu, stigma di masyarakat juga menjadi penyebab korban dan keluarganya enggan melaporkan kejadian tersebut karena takut menjadi perbincangan di masyarakat. Melaporkan kejahatan-kejahatan ini di media sosial juga dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi para korban. (Gultom, 2014)

Di Indonesia bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak selain dikenakan sanksi pidana penjara juga dikenai pidana denda. Terhadap ketentuan pidana denda bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban tetapi hanya mengakomodir kepentingan negara, yaitu sebagai pemasukan kepada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual. (Wahyuningsih, 2016)

Kasus predator seksual terhadap anak tiri yang disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang, dimana majelis hakim menjatuhkan hukuman Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 16 tahun, dan denda Rp 1 miliar dengan ketentuan jika tidak dibayar maka dihukum kurungan penjara selama 6 bulan karena melanggar Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Contoh yang lain Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN.Smg dengan terdakwa ROCHMANTO Bin SOEDJAIMI dimana pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober 2022 diduga telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Terdakwa di hukum berdasarkan Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN.Smg dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentaun apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menurut penulis, penelitian dengan judul: “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak”, adalah topik yang penting dan relevan, terutama dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Penelitian semacam ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang penegakan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, akan menjelajahi berbagai aspek, seperti proses penegakan hukum dan hambatan-hambatan hukum yang dapat diambil jika terjadi kasus kekerasan seksual atau masalah lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam bidang hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan metode, sistematika, dan pemikiran khusus untuk menganalisis fenomena hukum. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum non-doktrinal, yang salah satu bentuknya adalah penelitian diagnostik. Penelitian diagnostik bertujuan untuk mengungkap penyebab terjadinya suatu fenomena hukum atau beberapa fenomena sejenis dengan pendekatan deskriptif dan kualitatif (Huraerah, 2012). Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang tidak bergantung pada statistik tetapi lebih

berfokus pada pengumpulan data, analisis, dan interpretasi (Sunggono, 2013). Data yang digunakan terdiri dari sekunder, dan bahkan data tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang memungkinkan untuk mengamati dan menganalisis peraturan hukum serta bagaimana peraturan tersebut berfungsi dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang keadaan hukum atau gejala yuridis tertentu dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder terbagi menjadi beberapa kategori, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Marzuki, 2017).

Metode pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan, dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti (Miharja, 2023). Proses analisis melibatkan editing dan coding data untuk merapikan dan mengelompokkan informasi yang diperoleh dari responden atau pihak terkait. Dengan kombinasi berbagai teknik dan metode yang digunakan, penelitian ini dapat menyajikan hasil yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena hukum yang diteliti, serta memberikan kontribusi dalam pemahaman dan pengembangan ilmu hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Putusan No: 11/Pid.Sus/2023/PN.Smg

Penegakan hukum pidana merupakan bagian esensial dari upaya penanggulangan kejahatan, bertujuan melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, dan menegakkan keadilan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diadili di Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 11/Pid.Sus/2023/PN.Smg. menjadi contoh nyata bagaimana sistem hukum berupaya mengatasi kejahatan yang meresahkan.

Kasus ini melibatkan terdakwa Rochmanto alias Manto bin Sudjaimi, seorang pria berusia 42 tahun. Ia didakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya sendiri. Perbuatan keji ini terungkap telah berlangsung selama beberapa tahun, yaitu sejak 2017 hingga Oktober 2022. Peristiwa terakhir terjadi saat terdakwa menjemput korban pulang sekolah. Di dalam kamar korban, terdakwa melakukan serangkaian tindakan pelecehan, mulai dari meremas payudara, memasukkan jari ke dalam area intim korban, hingga menggesek-gesekkan alat kelaminnya di atas tubuh korban.

Selama persidangan, berbagai bukti dan kesaksian dihadirkan untuk mengungkap kebenaran. Keterangan korban sangat detail, menceritakan secara gamblang perbuatan yang ia alami. Kesaksian ini diperkuat oleh saksi lain, termasuk bibi korban dan guru bimbingan konseling di sekolahnya, yang pertama kali mendengar pengakuan korban.

Saksi ahli psikologi juga memberikan keterangan penting, menyatakan bahwa korban mengalami gangguan psikis dan menjadi cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya. Hasil visum et repertum menunjukkan adanya robekan lama pada selaput dara korban, yang semakin menguatkan dugaan kejahatan ini. Menghadapi bukti-bukti yang memberatkan, terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya. Ia bahkan mengaku terdorong untuk melakukan kejahatan setelah menonton video porno.

Jaksa Penuntut Umum melihat perbuatan terdakwa sebagai pelanggaran serius dan menuntutnya dengan hukuman 11 tahun penjara serta denda Rp1 miliar. Tuntutan ini didasarkan pada Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Namun, di sisi lain, penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan. Dalam pleidoinya, mereka memohon keringanan hukuman, meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, yaitu 3 tahun penjara. Alasan yang dikemukakan adalah karena terdakwa masih menjadi tulang punggung bagi dua anak kandungnya dan harus merawat ibunya yang sudah tua. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa terdakwa telah meminta maaf secara lisan dan tertulis kepada korban dan keluarganya.

B. Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor: 11/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Smg.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada terdakwa Rochmanto alias Manto, 42 tahun. Putusan ini diberikan setelah terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya sendiri. Putusan ini dianggap sebagai titik tengah yang adil, mengingat jaksa menuntut 11 tahun penjara dan terdakwa memohon hukuman 3 tahun.

Dalam memutus perkara ini, hakim berpedoman pada Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini, seperti "setiap orang", "melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan perbuatan cabul", dan "dilakukan oleh orang tua", dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Terdakwa, sebagai ayah tiri korban, seharusnya menjadi pelindung, bukan pelaku kejahatan. Hakim juga mempertimbangkan dua aspek utama:

1. Hal-Hal yang Memberatkan: Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dilakukan pada anak yang seharusnya ia lindungi. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya kejahatan yang dilakukan.
2. Hal-Hal yang Meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya, dan ia adalah tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak kandung serta ibu tua yang harus dirawat. Istri dan keluarga terdakwa juga telah memaafkan perbuatannya.

Putusan 10 tahun penjara ini mencerminkan prinsip keadilan yang seimbang. Tujuannya bukan semata-mata pembalasan, melainkan untuk memberikan efek jera, mendidik pelaku, serta mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Hukuman ini, yang berada di dalam rentang pidana yang diatur undang-undang (5 hingga 15 tahun), menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan semua fakta dan bukti di persidangan secara cermat.

Selain pidana penjara dan denda, hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dari total hukuman. Barang bukti berupa pakaian korban dikembalikan, sementara pakaian milik terdakwa yang terkait dengan kasus ini dirampas untuk dimusnahkan. Terdakwa juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp2.000. Analisis menunjukkan bahwa putusan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum dan harapan masyarakat.

C. Hambatan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak dan Solusinya.

Hambatan yang dihadapi oleh anak sebagai korban kekerasan seksual dalam perkara ini adalah rasa malu yang sering muncul ketika memberikan jawaban atau keterangan di persidangan. Hal ini disebabkan oleh keberadaan orang lain di ruang sidang, seperti keluarga korban, hakim, jaksa, penasihat hukum, bahkan hakim laki-laki, serta kehadiran terdakwa yang juga perlu dihadirkan karena memiliki hak untuk memberikan tanggapan terhadap kesaksian saksi. Faktor hakim juga dapat memengaruhi ketakutan korban dalam memberikan keterangan, karena ada beberapa hakim yang terkadang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang cenderung membuat korban merasa seolah-olah menyetujui perbuatan pelecehan seksual tersebut.

Dalam praktiknya, ketika mendalami keterangan anak sebagai saksi korban pelecehan seksual, tantangan yang dihadapi adalah sikap anak yang cenderung tidak terbuka dalam memberikan keterangan. Hal ini sering disebabkan oleh faktor ketakutan atau tekanan psikologis terhadap korban. Ketika diminta memberikan keterangan, anak sering kali tertutup dan tidak bersedia berbicara secara terbuka, yang mempersulit proses untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Hal ini biasanya terjadi akibat kondisi mental anak yang sangat terpuruk, sehingga sulit untuk meminta keterangan dari anak tersebut. Selain itu, faktor konfrontasi antara pelaku dan korban saat pemeriksaan di tingkat penyidikan juga dapat menjadi kendala. Kehadiran pelaku yang dihadapkan langsung kepada korban sering kali membuat anak merasa tidak siap dan trauma untuk melihat pelaku, sehingga kesulitan dalam memberikan jawaban atau mengingat kembali kejadian yang terjadi.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah dengan melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, karena terdakwa dalam perkara ini sudah dewasa dan dianggap cakap hukum. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi korban dalam memberikan keterangan, hakim memutuskan agar terdakwa sementara tidak diperbolehkan berada di ruang sidang sampai korban selesai memberikan keterangannya. Selain itu, keterangan dari para saksi yang tercatat dalam Berita Acara dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan. Dengan keputusan hakim ini, korban dapat merasa lebih tenang dan aman dalam memberikan keterangan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan temuan hasil yang telah disajikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal penegakan hukum, Terdakwa dituntut bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, dalam surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.

2. Pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan nomor 11/Pid.Sus/2023/PN. Smg, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang kemudian diputus hukuman penjara 11 (sebelas) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan. Dimana terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Undang-Undang tersebut yaitu unsur “setiap orang”, unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, dan unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih satu orang secara bersama-sama”.
3. Kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum tindak pidana seksual terhadap anak yaitu terjadinya banyak korban yang tidak bersedia menjadi saksi untuk diminta keterangan dalam proses penyidikan sehingga memakan waktu yang lama. Solusi dari kendala tersebut yaitu berita acara dibacakan dalam proses persidangan sehingga dengan adanya keputusan hakim tersebut korban lebih merasa tenang dan aman dalam memberikan keterangannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada sejumlah pihak yang turut berperan dalam menyelesaikan penelitian ini. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung, dan Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, serta Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H, sebagai Dekan dan Wakil Dekan I Fakultas Hukum, layak mendapat penghargaan atas dukungan dan bimbingan yang diberikan.

Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H, Kepala Prodi S1 Fakultas Hukum, yang memberikan motivasi, dan Ibu Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing, yang sabar memberikan bimbingan dan juga pantas mendapat apresiasi atas arahan serta dorongan positifnya.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, staf, dan karyawan yang memberikan ilmu, dukungan teknis, dan administratif. Keluarga, orangtua, dan teman-teman angkatan 2021 juga layak mendapat penghargaan atas doa, dukungan, dan semangat yang diberikan. Terima kasih kepada semua pihak yang turut serta, meski tidak disebutkan satu per satu, dalam menyelesaikan penelitian ini. Semua kontribusi dan dukungan sangat berarti bagi penulis. Terima kasih atas kerjasama dan kontribusi semua pihak dalam meraih kesuksesan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H., & Desasfuryanto, A. (2015). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK Press.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hikmawati, P. (2021). Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Contitutum dan Ius Constituendum. *Jurnal Negara Hukum*, 73.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Kusfitono, K. M. (2017). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 35-47.
- Lamintang, P. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Maerani, I. A., & Istianah, S. R. (2022). The Formulation Of The Idea Of Forgiveness In Indonesia Criminal Law Policy (A Study Based On Restorative Justice & Pancasila Values). *Jurnal Daulat Hukum Master Of Law*, 12.
- Marzuki, P. m. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miharja, M. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Cendekia Press.
- Millatina, A. H. (2018). eran ECPAT Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia. *Journal Of International Relations*, 537.
- Nasional, D. P. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Reksodiputro, M. (1987). *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Remelink, J. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.

Sunggono, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 172.